

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ini ditandai dengan adanya faktor peningkatan jumlah UMKM, ekspansi perdagangan non-migas, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mobilitas tenaga kerja (Subagyo, 2020). Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM merupakan aktivitas ekonomi atau praktik jual beli yang berorientasi pada hasil dan dijalankan oleh individu atau badan dengan kriteria tertentu. Setiap tahunnya jumlah UMKM yang beroperasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kemenkop dan UKM, jumlah UMKM yang tercatat telah mencapai sekitar 64,2 juta unit, dan memberikan peran terhadap PDB negara sebesar 60,51% dengan nilai mencapai Rp 9.580 Triliun, kemudian telah menyerap sekitar 97% tenaga kerja yang membantu dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia (Yuningsih et al., 2022).

Eksistensi UMKM juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional (Novrizaldi, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari OSS Kementerian Investasi/BKPM, Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota dengan perkembangan jumlah UMKM mencapai 28.565 unit. Peningkatan jumlah UMKM terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya semakin baik. Pertumbuhan tersebut disertai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot setempat dalam melakukan pembinaan bagi UMKM. Kota Tasikmalaya tidak hanya berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal tetapi dapat menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat (Jabarprov, 2023). Kota ini juga

dikenal dengan berbagai macam produk unggulan yang khas, seperti sentra kerajinan batik, bordir, mendong, payung geulis, kelom geulis, konveksi, fashion, kriya, aksesoris serta aneka makanan olahan yang tersebar di 10 Kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Februari 2025 berikut ini disajikan data jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Tasikmalaya:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Tasikmalaya Berdasarkan Skala Usaha

Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Bungursari	1.977	30	3
Cibeureum	2.541	18	3
Cihideung	2.855	35	1
Cipedes	3.173	39	1
Indihiang	3.330	24	-
Kawalu	3.646	26	1
Mangkubumi	3.764	30	5
Purbaratu	1.455	15	-
Tamansari	2.793	25	1
Tawang	2.714	37	2
Total	28.428	300	17

Sumber: OSS Kementerian Investasi / BKPM (2024)

Jika dilihat dari Tabel 1.1 Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya memiliki jumlah UMKM terbanyak, kemudian diikuti oleh Usaha Kecil dan Menengah. Namun, jika dilihat berdasarkan kriteria omset yang tercantum dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menghasilkan jumlah omset lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Oleh karena itu, meskipun jumlah UKM lebih sedikit tetapi skala usaha yang dihasilkan berpotensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian (Maesaroh, 2020). Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS),

proporsi penduduk usia produktif di Kota Tasikmalaya saat ini telah mencapai 68,48% atau sekitar 518.931 dengan rentang usia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sementara itu, 7,15% atau sekitar 54.172 jiwa lainnya tergolong ke dalam kelompok usia non-produktif yaitu mereka yang berusia di atas 65 tahun dan sisanya merupakan kelompok usia muda (BPS Tasikmalaya, 2024). Besarnya populasi penduduk usia produktif di suatu wilayah dapat menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Utami, 2023).

Selain pesatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM, diperlukan juga peninjauan terhadap kinerja keuangan untuk dapat mendorong keberlanjutan usaha. Kinerja keuangan yang optimal membangun indikator pencapaian suatu entitas bisnis, karena berkorelasi dengan pendapatan usaha yang dihasilkan. Maka dari itu, setiap usaha harus mengukur dan menilai kinerja keuangan usahanya (Raudina, 2024). Penilaian atas aktivitas keuangan UMKM dapat dilakukan melalui informasi pencatatan yang telah berlangsung. Melalui penerapan akuntansi, para pelaku UMKM dapat memahami kondisi keuangan bisnis secara lebih jelas (Riadi, 2022). Pencatatan keuangan yang akurat memungkinkan pemantauan arus kas masuk dan keluar, sehingga penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat dibutuhkan. Sistem ini dapat berguna untuk memastikan seluruh transaksi terdokumentasi secara sistematis, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan memudahkan analisis keuangan, (Prastika & Purnomo, 2019). Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Pondok et al. (2023) menyatakan bahwa SIA memberikan manfaat bagi UMKM karena dapat membantu mengevaluasi kinerja, pengendalian internal, perencanaan proses bisnis, dan pengambilan keputusan.

Akan tetapi, tantangan dalam proses pencatatan masih menjadi kendala utama bagi UMKM di Kota Tasikmalaya. Banyak pelaku UMKM mengalami keterbatasan sumber daya untuk melakukan pencatatan keuangan, sehingga menyulitkan lembaga keuangan untuk memperoleh

data keuangan yang digunakan sebagai dasar pemberian kredit. Temuan dari penelitian Maesaroh (2020) mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di Kota Tasikmalaya masih menerapkan metode pembukuan sederhana. Kondisi ini menunjukkan keselarasan dari penelitian yang dilakukan oleh Suhendro et al. (2019) yang mengemukakan bahwa penggunaan pembukuan sederhana disebabkan oleh minimnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai standar akuntansi yang berlaku, tidak adanya tenaga akuntansi yang menangani proses pencatatan, dan pembukuan hanya digunakan untuk kepentingan internal saja. Selain itu, laporan keuangan yang tidak memenuhi standar perbankan menyebabkan UMKM kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial dari pihak bank. Akibatnya, bank mengalami kesulitan dalam menilai kondisi keuangan UMKM secara komprehensif saat pengajuan kredit (Nurhidayah, 2024). Oleh sebab itu, penting bagi UMKM untuk memiliki sistem pencatatan akuntansi yang memadai agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Sehingga memungkinkan mereka untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Umumnya pelaku usaha yang ingin mengajukan kredit kepada lembaga penyedia dana akan diminta laporan keuangan sebagai syarat penilaian kelayakan kredit. Maka dari itu, penerapan SIA memiliki peran esensial dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat untuk dapat meningkatkan kredibilitas dari lembaga keuangan (Prastika & Purnomo, 2019).

Kredibilitas menjadi faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan, di mana akses terhadap layanan keuangan formal berperan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Mengacu pada peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 inklusi keuangan didefinisikan sebagai penyediaan layanan atau institusi keuangan formal yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari inklusi keuangan adalah memberikan akses yang lebih luas kepada individu maupun pelaku usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan

keuangan yang esensial. Keberadaan inklusi keuangan mempermudah UMKM dalam menerima pembiayaan dari lembaga keuangan sebagai modal usaha (Novitasari, 2023). Penelitian Abrari dan Rauf (2023) juga menyatakan hal serupa terkait inklusi keuangan yaitu semakin luas tingkat inklusi keuangan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM.

Namun, berdasarkan hasil pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tasikmalaya, disebutkan bahwa kendala yang dihadapi UMKM di Kota Tasikmalaya masih terkait keterbatasan modal. Sebagian besar diantaranya belum memiliki aset maupun dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai agunan kepada pihak bank untuk memperoleh pinjaman. Akibatnya, pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya sering kali kesulitan memenuhi persyaratan tersebut, sehingga mereka lebih memilih mengandalkan dana pribadi dalam menjalankan operasional usahanya. Selain itu, perspektif konsumtif dapat mengurangi kredibilitas pihak perbankan dalam menyalurkan pinjaman kepada UMKM (Maesaroh, 2020).

Meskipun demikian, Kepala OJK Tasikmalaya Melati Usman mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2025 akan berupaya meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur. Upaya tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti, Pemda dan industri jasa keuangan. Salah satu program kerja yang diluncurkan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya (Radio Republik Indonesia, 2025). Penguatan inklusi keuangan juga memerlukan optimalisasi terhadap pemanfaatan *financial technology (fintech)*, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi serta memperluas cakupan layanan keuangan. Peran yang dimainkan oleh *fintech* memberikan keuntungan yang ditawarkan, salah satunya melalui sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) yang memungkinkan transaksi

dilakukan dengan lebih efisien dan praktis (Putra, 2023). Namun, pemanfaatan teknologi oleh UMKM tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain, faktor risiko kesalahan teknis, keamanan aplikasi yang diragukan, serta kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang masih rendah (Gumilar et al., 2024). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dea et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan layanan *fintech* cenderung mengalami peningkatan pendapatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengadopsi *fintech*. Hal ini disebabkan karena, *fintech* mempermudah akses pendanaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Peningkatan kinerja keuangan UMKM tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, melainkan juga pemahaman mengenai literasi keuangan yang dimiliki. Literasi keuangan berperan penting dalam mendukung penguatan kinerja keuangan (Novitasari, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astari dan Candraningrat (2022) yang juga telah membuktikan literasi keuangan dapat dijadikan variabel moderasi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan literasi keuangan dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi keuangan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya dinilai belum memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai, sehingga mayoritas dari mereka belum menerapkan pelaporan keuangan yang efektif dalam menjalankan usahanya (Maesaroh, 2020). Mayoritas pelaku UMKM tidak memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan menghambat pelaku UMKM mengawasi kinerja keuangan yang efektif untuk pengambilan keputusan manajerial (Adhitya, 2018).

Studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutasoit (2024), Ahmad et al. (2023), Yuliani et al. (2024), Novitasari (2023) menunjukkan

bahwa sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan, *financial technology*, dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UKM. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Arumsari (2021) Usmaniyah dan Abrori (2024), Zs et al. (2023), Novianti (2024) menunjukkan fakta yang berbeda yaitu sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan, *financial technology*, dan literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UKM.

Meskipun penelitian ini mengangkat topik yang serupa dengan penelitian terdahulu mengenai Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Inklusi Keuangan, *Financial Technology (fintech)* dan literasi keuangan, namun pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu aspek, pengujian terhadap variabel tersebut masih dilakukan secara parsial. Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan mengkombinasikan variabel SIA, inklusi keuangan, dan *fintech* dengan menambahkan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan perspektif baru dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya. Hal ini didasari alasan karena UKM memiliki skala usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro, yang ditandai dengan tingkat omset dan kompleksitas operasional yang lebih tinggi. Kondisi ini mendorong UKM untuk meningkatkan penggunaan informasi akuntansi dalam aktivitas operasional dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Semakin tinggi skala usaha, maka semakin tinggi tingkat kebutuhan informasi akuntansi yang akurat. Selain itu, UKM dipandang memiliki struktur bisnis yang lebih matang dibandingkan usaha mikro. Sehingga kebutuhan terhadap akses layanan keuangan formal dan pemanfaatan teknologi keuangan sangat penting guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja keuangan (Laraswati et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan *Financial Technology* Terhadap Kinerja Keuangan UKM Di Kota Tasikmalaya: Peran Literasi Keuangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya?
3. Apakah *financial technology* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya?
4. Apakah literasi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya?
5. Apakah literasi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya?
6. Apakah literasi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya.
4. Mengetahui dapatkah literasi keuangan memoderasi (memperkuat) pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya.
5. Mengetahui dapatkah literasi keuangan memoderasi (memperkuat) pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya.
6. Mengetahui dapatkah literasi keuangan memoderasi (memperkuat) pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada berbagai aspek, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan teori serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan saat ini. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan, dan *financial technology* dapat mempengaruhi kinerja keuangan UKM dengan mempertimbangkan literasi keuangan sebagai variabel yang dapat memoderasi (memperkuat) hubungan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada berbagai pihak, di antaranya:

- a) Pelaku UKM, khususnya yang berada di Kota Tasikmalaya sebagai bahan pertimbangan dan panduan dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi, memanfaatkan layanan inklusi keuangan, dan mengadopsi *financial technology*. Selain itu, meningkatkan pemahaman akan pentingnya literasi keuangan untuk memperkuat kinerja keuangan usaha yang dijalankan.
- b) Peneliti, memperluas wawasan serta interpretasi mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan, dan *financial technology* terhadap kinerja keuangan UKM dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi.
- c) Akademisi dan pembaca, sebagai sumber tambahan literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian atau kajian ilmiah yang membahas topik serupa.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdasarkan analisis permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis menetapkan batasan penelitian terhadap variabel yang digunakan yaitu sistem informasi akuntansi, inklusi keuangan, dan *financial technology* yang dimoderasi oleh literasi keuangan.